



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEMPEL  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEMPEL TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

## BAB III RKP Desa

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Tempel Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2024 dibebankan pada APB Desa Tempel Tahun Anggaran 2023.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel .

Ditetapkan di Tempel  
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

Diundangkan di Tempel  
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA TEMPEL,

ttd

TITIK SUFINAHITIN

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TEMPEL TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 6);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2024

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### 1. MAKSUD

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

#### 2. TUJUAN

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Tempel Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

#### E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

##### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

##### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.  
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.  
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.  
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.  
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

##### BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

##### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

##### BAB V : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II  
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera di Desa Tempel sejumlah 498 KK.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Tempel baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Luas Wilayah 367,6145 Ha
- 2) Jumlah Penduduk 1813 jiwa dan 608 KK
  - Laki-laki : 920
  - Perempuan : 893
- 3) Tingkat Pendidikan
  - a) Belum sekolah : 135 jiwa
  - b) Tamat SD : 69 jiwa
  - c) Tamat SLTP/ sederajat : 255 jiwa
  - d) Tamat SMA/ sederajat : 319 jiwa
  - e) Sarjana D I – DIII / S1 : 58 jiwa
- 4) Tingkat Pekerjaan
  - a) Petani : 32 jiwa
  - b) Karyawan swasta : 564 jiwa
  - c) PNS : 25 jiwa
  - d) Buruh Tani/ nelayan : 164 jiwa
  - e) Buruh Pabrik : 146 jiwa
  - f) Wiraswasta/ pedagang : 480 jiwa
- 5) Fasilitas Infrastruktur Dasar
  - a) PKD : 1 unit
  - b) Puskesmas pembantu : - unit
  - c) Pos PAUD : 1 unit
  - d) TK : 3 unit
  - e) SD : 4 unit
  - f) SMP : - unit
  - g) Kantor Desa : 1 unit
- 6) Kondisi Tanah
  - a) Tanah Sawah : 59,2824 ha
  - b) Tanah Kering : 311,7760 ha
  - c) Tanah Fasilitas Umum : 6,5561 ha

## B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

### 1. Keberhasilan

#### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
  - (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
  - (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
  - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
  - (d) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - (e) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - (f) Penyediaan Tunjangan BPD
  - (g) Penyediaan Operasional BPD
  - (h) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
  - (i) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkong)
  - (j) Tunjangan Hari Raya
  - (k) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - (b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
  - (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
  - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)
  - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  - (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
  - (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - (g) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa

- (h) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
- 5) Sub Bidang Pertanahan
  - a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b. Pensertifikatan Asset Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 1) Sub Bidang Pendidikan
    - (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
  - 2) Sub Bidang Kesehatan
    - (a) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - (b) Penyelenggaraan Posyandu
    - (c) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
    - (d) Penangungan Stunting
  - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - (a) Pembangunan talud JUT Utara Taru
    - (b) Pembangunan Aspal Jalan Dk. Tegal RW 03
    - (c) Pembangunan Urug jalan Dk. Tempel
    - (d) Pembangunan Talud Dk. Sidomulyo
    - (e) Pembangunan Pengaspalan Lapen Jalan Dukuh Gunungsari Rt 01/06
    - (f) Pembangunan Aspal Sheet Jalan Usaha Tani Gunungsari – dopleng.
  - 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
    - b. Intrenet Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
    - a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes
    - b. Pembangunan Poskamling RW 04
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
    - b. Pembinaan Karang taruna
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
    - (b) Pembinaan PKK
    - (c) Pembinaan RT/RW

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - (a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
    - (b) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana
  - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
    - (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - (c) Peningkatan Kapasitas BPD
  - 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - a. Pelatihan Pengurus BUMDes
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  - 1) Sub Bidang Keadaan Darurat
    - a. Penanganan Keadaan Darurat
  - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak

2. Kegiatan yang belum terlaksana

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 1) Sub Bidang Pertanahan
    - a. Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa
    - b. Pemsertifikatan Tanah Kas Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 1) Sub Bidang Kesehatan
  - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - (a) Pembangunan Talud jalan dukuh Gunungsari RT 02/06
    - (b) Pembangunan Talud JUT
  - 3) Sub Bidang Kawasan Permukiman
    - (a) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
    - (b) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dll)
    - (c) Pembangunan Talud Makam Dukuh Tempel RW 03
    - (d) Pembangunan Poskamling Dukuh Sidomulyo RW 01
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 1) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

BAB III  
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi Perekonomian Desa

Desa Tempel terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Tempel mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Tempel merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Tempel mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Desa Tempel mempunyai 9 kios milik desa yang disewakan untuk warga Desa Tempel, selain itu Desa Tempel mempunyai BUMDesa yang bergerak dibidang Perdagangan.

Dalam meningkatkan perekonomian desa diatas, maka dari itu perlu adanya dukungan insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dukungan insfrastruktur sarana dan prasarana desa, meningkatkan struktur permodalan sehingga volume usaha meningkat yang juga mempengaruhi pendapatan desa.

Potensi Hasil Pertanian

| No | Komoditas      | Produksi / Tahun |          |
|----|----------------|------------------|----------|
|    |                | 2022             | 2023     |
| 1  | Padi           | 3700 ton         | 4200 ton |
| 2  | Jagung         | 375 ton          | 350 ton  |
| 3  | Kacang Panjang | 15 ton           | 5 ton    |
| 4  | Tebu           | 5 ton            | 7 ton    |
|    |                |                  |          |

Potensi Hasil Peternakan

| No | Komoditas    | Produksi / Tahun |           |
|----|--------------|------------------|-----------|
|    |              | 2022             | 2023      |
| 1  | Kambing      | 56 ekor          | 76 ekor   |
| 2  | Sapi         | 7 ekor           | 12 ekor   |
| 3  | Bebek        | 340 ekor         | 350 ekor  |
| 4  | Lele         | 1500 ekor        | 2000 ekor |
| 5  | Puyuh        | 2000 ekor        | 3000 ekor |
| 6  | Ayam petelur | 1000 ekor        | 2000 ekor |

## B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa )

Berdasarkan Peraturan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempel Tahun 2019 – 2024, pada tahun 2023 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

## C. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat dan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran air, penanganan sampah.

## D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa .

Masalah tersebut meliputi:

1. kemungkinan wabah penyakit menular atau pandemi yang belum berakhir maka perlu cara- cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tempel yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

#### A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

##### 1. RUMUSAN PRIORITAS

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Tempel secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
  - (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
  - (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
  - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
  - (d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - (e) Penyediaan Tunjangan BPD
  - (f) Penyediaan Operasional BPD
  - (g) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
  - (h) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - (i) Tunjangan Hari Raya
  - (j) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - (b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
    - (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
    - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)
    - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    - (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
    - (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
    - (g) Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
    - (h) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
    - (i) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektor (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
  - 5) Sub Bidang Pertanahan
    - (a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - (b) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
    - (c) Pensrtifikatan Tanah Kas Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Sub Bidang Pendidikan
    - (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MasdrasahNon Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
    - (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
    - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasraana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
    - (d) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/taman bacaan milik desa)
  - 2) Sub Bidang Kesehatan
    - (a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
    - (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
    - (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
    - (d) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
  - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - (a) Pembangunan Talud JUT
    - (b) Pengaspalan Jalan Dk. Gunungsari
    - (c) Pembangunan Betonisasi Dk. Kerjan Rt 02/02
    - (d) Pembangunan Talud Jalan Dk. Gunungsari Rt 02/06
    - (e) Pembangunan Talud Makam Dukuh Kerjan Rt 01/02
    - (f) Pembangunan gorong-gorong JUT Dk. Tempel

- (g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Poskamling Dewo
- (h) Pembangunan Aspal Dukuh Dewo Rt 02/04
- (i) Pembangunan BRC Dukuh Taru
- (j) Pengaspalan Jalan Dukuh Tempel
- (k) Pembangunan Gudang RT
- (l) Pembangunan Gorong-gorong
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman
  - (a) Dukungan Penyelenggaraan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
  - (b) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
  - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
    - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - (a) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan dll) tingkat desa
    - (b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
    - (c) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
    - (d) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
    - (b) Pembinaan PKK
    - (c) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - (a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
    - (b) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
    - (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    - (c) Peningkatan Kapasitas BPD

- (d) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
- 3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  
Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 4) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal  
Penanaman Modal BUMDesa
- 5) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
  - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana  
Penanggulangan Bencana
  - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat  
Keadaan darurat
  - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak  
Keadaan Mendesak

## 2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.591.758.000,- yang bersumber dari :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa           | Rp. 76.900.000,-  |
| b. Dana Desa                      | Rp. 972.971.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 266.822.000,- |
| d. Alokasi Dana Desa              | Rp. 915.065.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Provinsi      | Rp. 225.000.000,- |
| f. Bantuan Keuangan Kabupaten     | Rp. 135.000.000,- |

### Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

| KODE | URAIAN                  | JUMLAH (RP.)     | KET. |
|------|-------------------------|------------------|------|
| 1    | 2                       | 3                | 4    |
| 5    | BELANJA                 |                  |      |
| 5.1  | Belanja Pegawai         | 741.996.000,00   |      |
| 5.2  | Belanja Barang dan Jasa | 655.204.600,00   |      |
| 5.3  | Belanja Modal           | 734.736.000,00   |      |
| 5.4  | Belanja Tidak Terduga   | 459.822.000,00   |      |
|      | Jumlah Belanja          | 2.591.758.000.00 |      |

B. PRIORITAS PPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Tempel tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tempel yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  - a. Pembuatan Talud Sungai timur Dk. Tempel Rt 02/03
  - b. Pembangunan Mushola Kantor Desa Tempel
  - c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Dukuh Sidomulyo sampai Dukuh Taru, Tempel, Gatak
  - d. Pengaspalan Jalan Lettu Supangat sd Perbatasan dengan Desa Klaseman, Gatak
  - e. Pengaspalan Jalan Dukuh Tempel Rt 01/03 Tempel Gatak
  - f. Pembangunan Talud Tanggul Makam Dukuh Kerjan Ds Tempel
  - g. Pengaspalan Jalan Dukuh Dewo s/d Doplang
  - h. Pembangunan Gorong-gorong JUT Utara Dukuh Dewo
2. Bidang Kawasan Permukiman
  - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
  - b. Drainase RW 01 Dukuh Sidomulyo

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA